

RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KINERJA HAK ASASI MANUSIA (IKH), 2013

SETARA Institute, Jakarta, 9 Desember 2013

PENDAHULUAN

Pada 10 Desember 2013, warga dunia akan merayakan Hari Internasional Hak Asasi Manusia. Tepatnya 65 tahun yang lalu, 10 Desember 1948 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi naskah acuan bagi setiap negara di dunia untuk memperlakukan manusia secara bermartabat, dengan menghargai integritas diri dan seperangkat hak-hak yang melekatnya. Dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional dan evaluasi tahunan kinerja hak asasi manusia di Indonesia, untuk keempat kalinya SETARA Institute menyelenggarakan survei persepsi untuk mengukur Indeks Kinerja Penegakan HAM di Indonesia, 2013.

Tujuan utama penyusunan Indeks Kinerja HAM adalah untuk [a] memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli dan aktivis HAM dan demokrasi tentang situasi hak asasi manusia mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; [b] melakukan evaluasi dan advokasi kinerja HAM; dan [c] menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Laporan Indeks Kinerja Penegakan HAM disusun dengan menggunakan **pendekatan survei** dengan sampel 200 responden di 20 propinsi yang terdiri dari pegiat HAM, akademisi, tokoh masyarakat. Survei dilakukan dari tanggal 28 November-5 Desember 2013. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang ditetapkan oleh SETARA Institute berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan *snowballing* di mana satu narasumber dapat menginformasikan narasumber lain yang layak untuk menjadi responden survei ini. Pengumpulan data dilakukan dengan *web-based survey*, dimana para responden mengisi kuesioner dengan masuk (*login*) ke website khusus <http://survey.setara-institute.org/>. Para responden yang terpilih, diberikan *username* dan *password* yang hanya dapat digunakan satu kali partisipasi survei. Dengan demikian, keberualangan dapat dihindari. Untuk memastikan

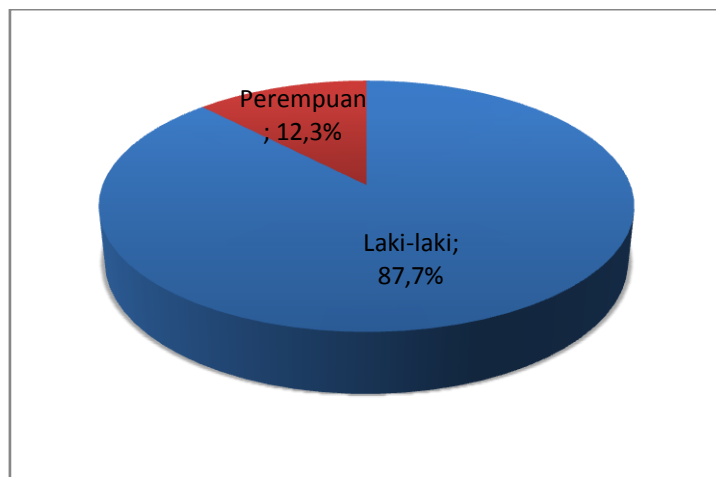
akurasi, peneliti juga melakukan *spotcheck* terhadap 10% responden dengan menggunakan telepon.

Survei pengukuran indeks persepsi ini **menggunakan skala** pengukuran angka “0” untuk menunjukkan performa yang paling lemah dan angka “7” untuk menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM. Sementara untuk mengukur isu HAM dan Kepemimpinan Nasional, pertanyaan disusun dengan model *multiple choice* dan open question untuk menggali argumen pilihan responden.

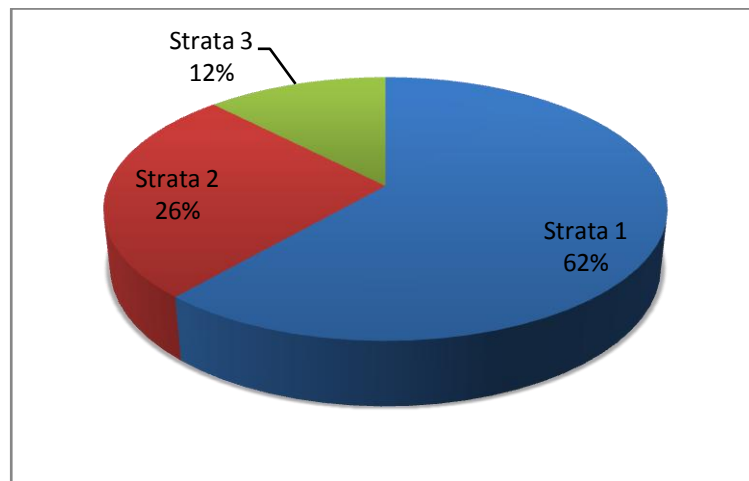
TEMUAN

A. DEMOGRAFI RESPONDEN

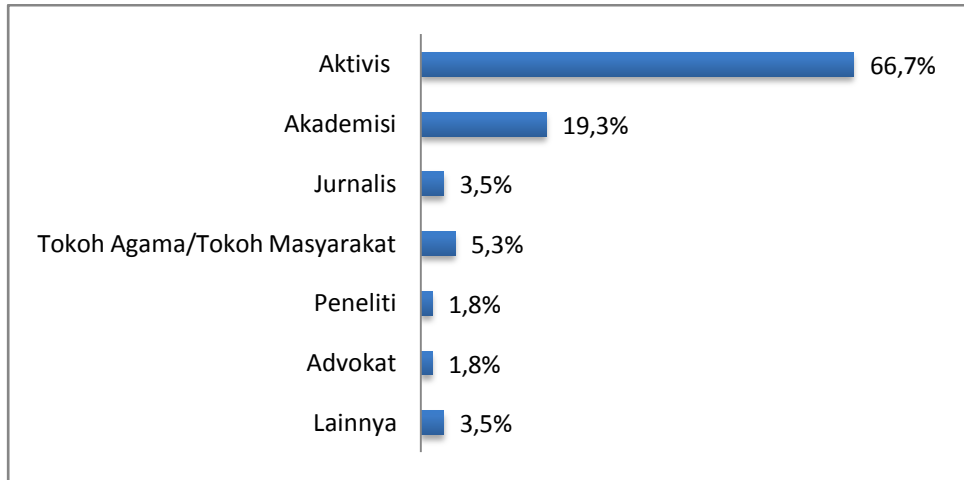
Grafik 1: Jenis Kelamin



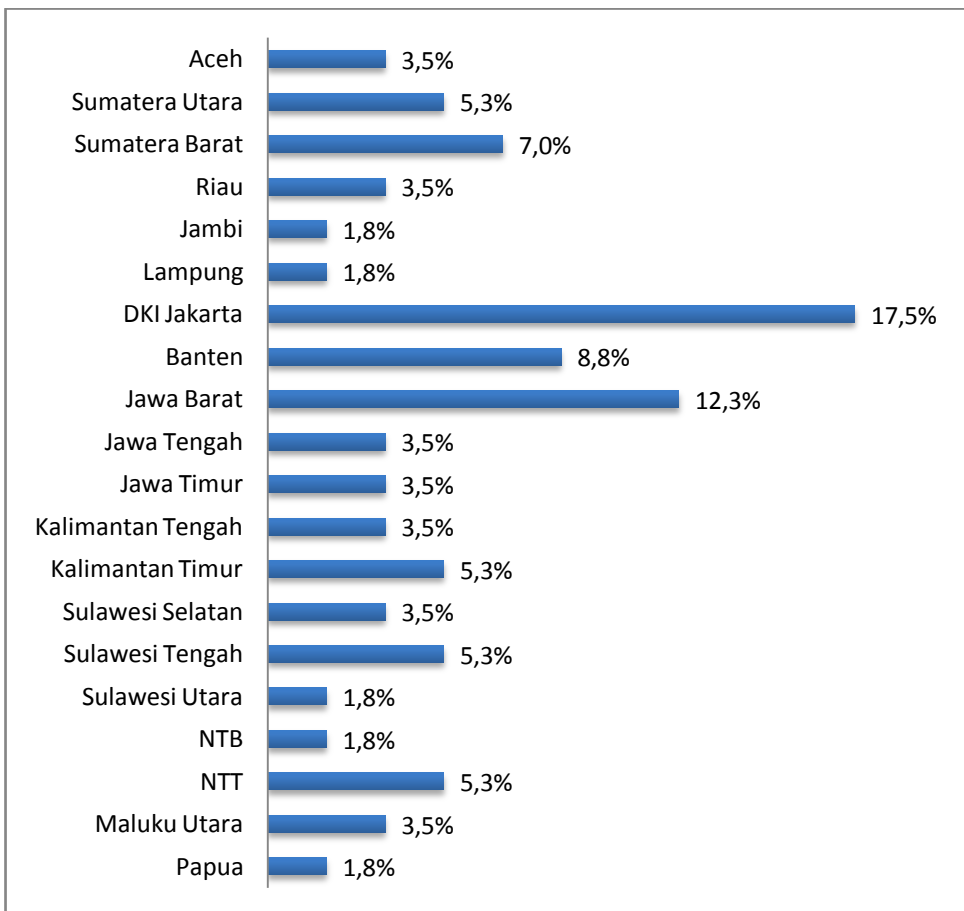
Grafik 2: Pendidikan Responden



Grafik 3: Profesi/Kategori Responden



Grafik 4: 20 Propinsi Domisili Responden



B. INDEKS HAM

1. Tabel berikut ini merupakan rekapitulasi persepsi responden terhadap 8 indikator utama, yang dijadikan sebagai alat ukur.

No	INDIKATOR	SCORE
		2013
1.	PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU	1,40
2.	KEBEBASAN BEREKSPRESI	2,10
3.	KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN	1,80
4.	RANHAM DAN KINERJA LEMBAGA HAM	2,90
5.	RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA	2,50
6.	PENGHAPUSAN HUKUM MATI	1,90
7.	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI	2,80
8.	HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA	2,60

2. Sebagai perbandingan dengan survei pada tahun-tahun sebelumnya, berikut ini adalah **tabel perbandingannya**:

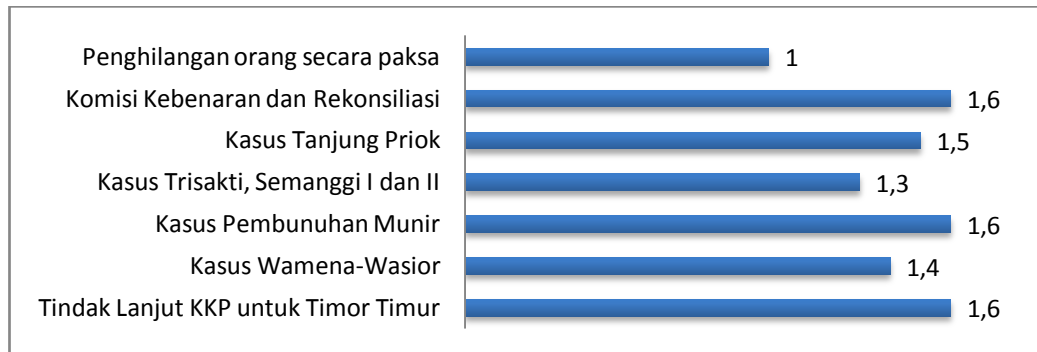
No	INDIKATOR	SCORE			
		2013	2012	2011	2010
1.	PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU	1,40	1,44	1,40	1,14
2.	KEBEBASAN BEREKSPRESI	2,10	3,06	2,50	2,25
3.	KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN	1,80	2,45	2,30	1,00
4.	RANHAM DAN KINERJA LEMBAGA HAM	2,90	3,72	3,10	2,00
5.	RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA	2,50	3,06	2,00	3,66
6.	PENGHAPUSAN HUKUM MATI	1,90	2,35	1,80	3,66
7.	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI	2,80	3,27	2,80	4,00
8.	HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA ¹	2,60	3,23	2,50	-

3. Berikut ini adalah rincian *score* untuk masing-masing indikator dan sub indikator.

¹Untuk indikator hak atas ekonomi, sosial, budaya, pada tahun 2010 tidak diikutsertakan sebagai indikator survei baru pada tahun 2011 dan 2012 menjadi indikator survei. Karena itu pada tahun 2010, score-nya tidak ada.

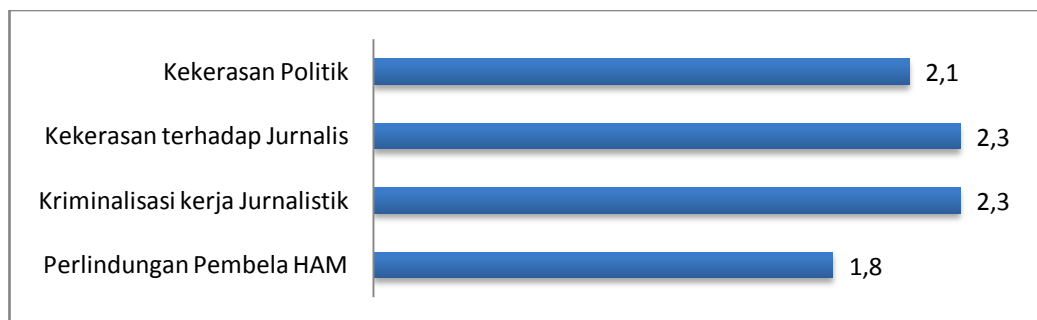
INDIKATOR 1:

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU – 1,40



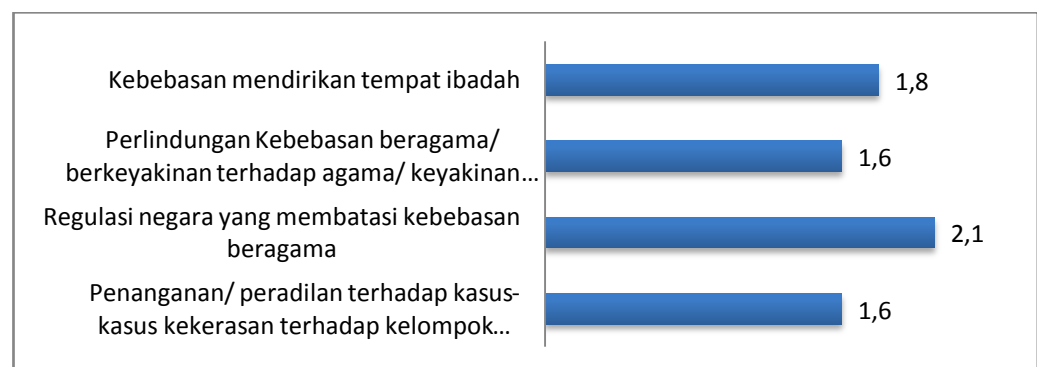
INDIKATOR 2:

KEBEBASAN BEREKSPRESI – 2,10

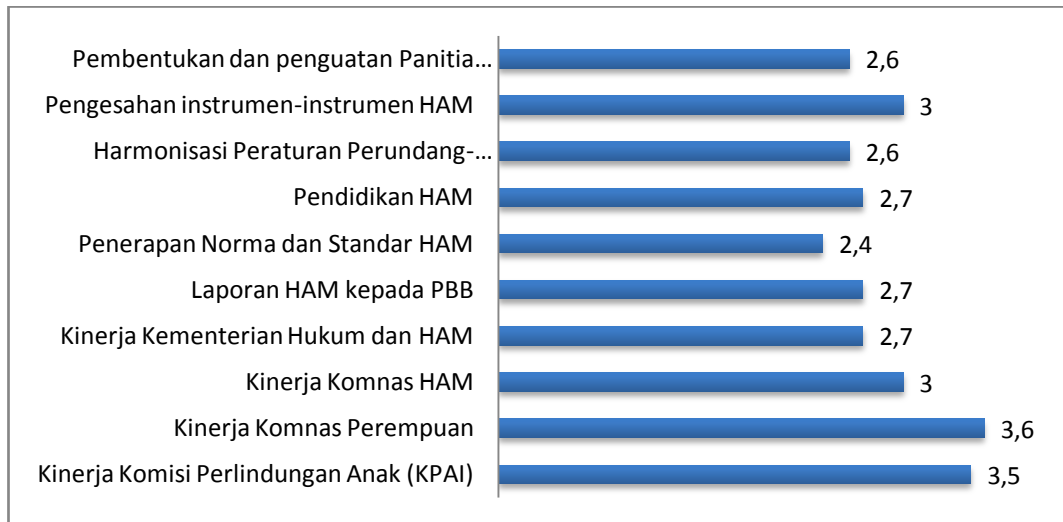


INDIKATOR 3:

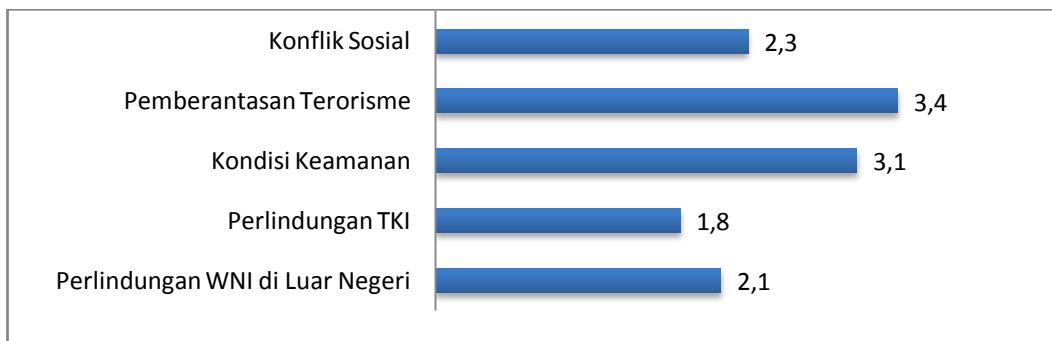
KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN– 1,8



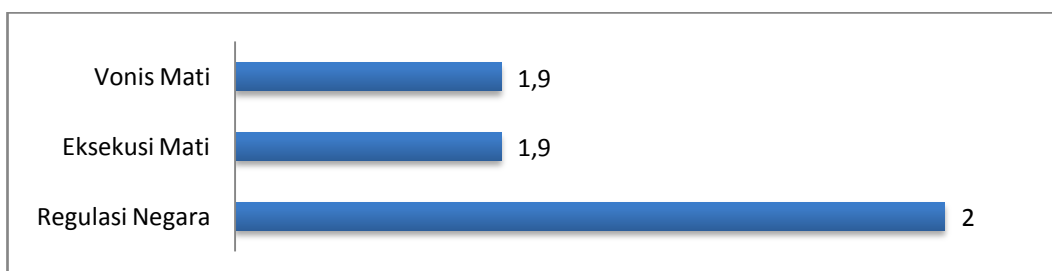
INDIKATOR 4:
RANHAM DAN KINERJA LEMBAGA HAM – 2,90



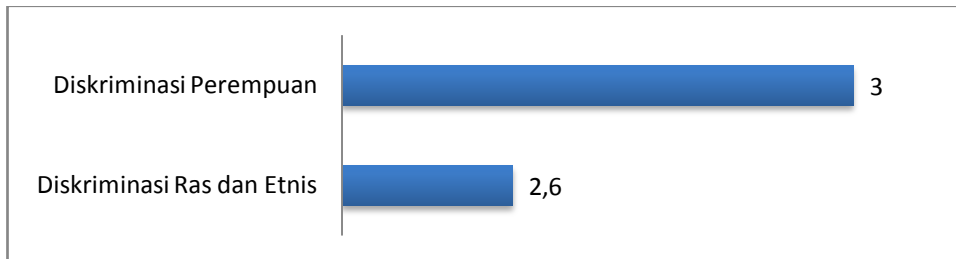
INDIKATOR 5:
RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA – 2,50



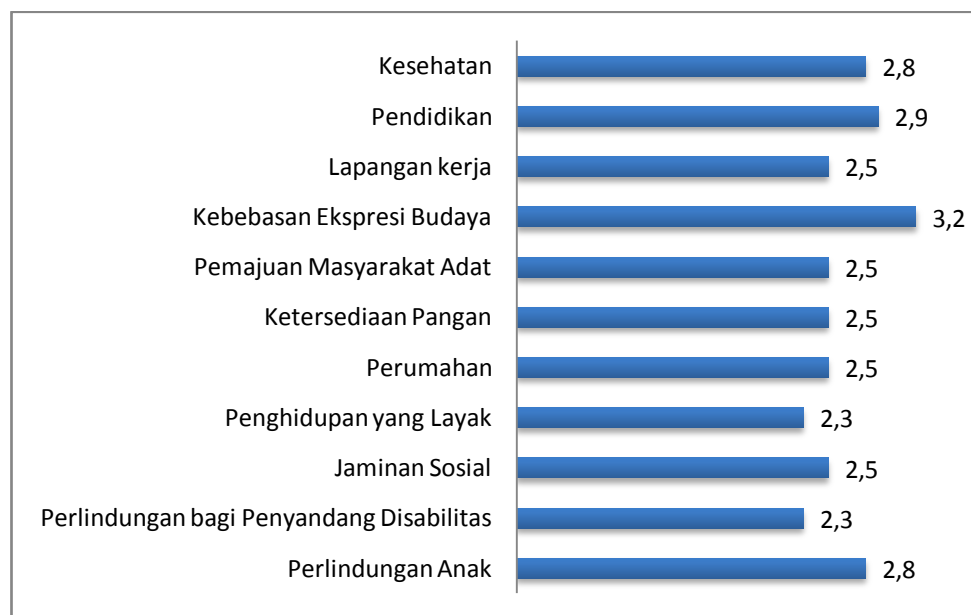
INDIKATOR 6:
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI – 1,90



**INDIKATOR 7:
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI – 2,80**



**INDIKATOR 8:
HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA – 2,60**



4. Jika ditarik rata-rata score untuk 8 indikator utama, maka score indeks kinerja penegakan HAM tahun 2013 adalah 2,25 menurun dari tahun sebelumnya, yang rata-rata berada pada skor 2,82 (2012), skor 2,30 (2011), dan skor 2,53 (2010). Tren menurun pada tahun 2013 menggambarkan akumulasi kekecewaan publik pada negara, khususnya pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang hingga di masa akhir tahun jabatannya, tidak menunjukkan kesungguhan dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Angka moderat untuk kinerja HAM dengan skala indeks 0-7 adalah pada skor 4 – 5. Tren menurun pada indeks kinerja HAM 2013 ini paralel dengan kekecewaan publik yang digambarkan dari

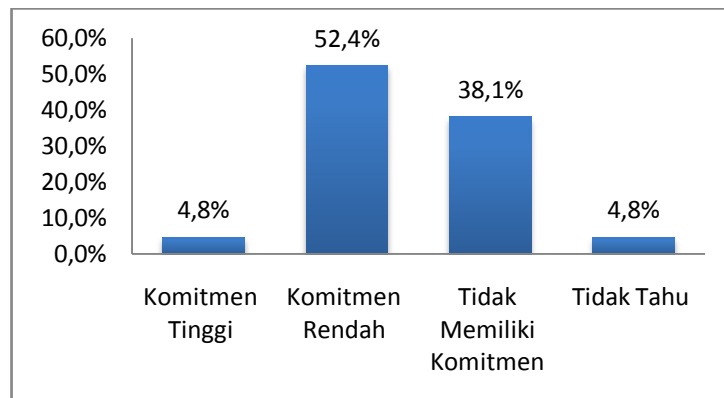
berbagai survei politik, terkait elektabilitas Partai Demokrat yang terus terjun ke papan bawah dengan potensi perolehan suara minimum.

C. HAM DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan periode kepemimpinan nasional pada tahun 2014, SETARA Institute juga memotret isu HAM dalam pusaran kepemimpinan nasional dan Pemilu 2014. Dua periode kepemimpinan politik Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014, dipersepsi oleh responden sebagai kepemimpinan tanpa komitmen nyata pada pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Akumulasi kekecewaan tergambar dari persepsi responden yang mengatakan bahwa SBY memiliki komitmen rendah (52,4%) pada HAM. Bahkan 38,2% responden mengatakan SBY tidak memiliki komitmen. Hanya 4,8% responden yang menyatakan SBY memiliki komitmen tinggi pada HAM. **Lihat Grafik 5.**

Grafik 5:

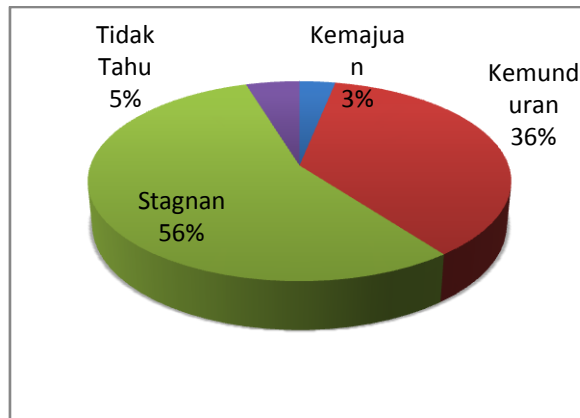
Komitmen SBY terhadap Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM



Dengan komitmen yang rendah, bahkan sebagiannya menganggap tidak memiliki komitmen, responden menilai bahwa selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM mengalami stagnasi alias jalan di tempat (56%). Bahkan (36%) responden memberikan penilaian yang lebih buruk, di mana selama kepemimpinan SBY, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM justru mengalami kemunduran. **Lihat Grafik 6.** Persepsi buruk ini bisa jadi disebabkan SBY tidak memanfaatkan stabilitas politik dan dua periode kepemimpinannya untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu, yang oleh responden dianggap sebagai menjadi tanggung jawabnya (77,8%). Modal sosial politik SBY semestinya mampu menggerakkan pemerintahan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. **Lihat Grafik 7.**

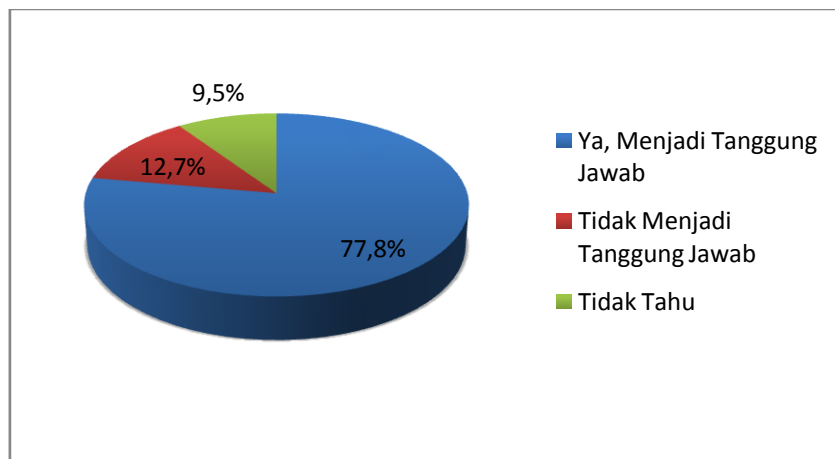
Grafik 6:

Kondisi Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM di masa SBY



Grafik 7:

Penyelesaian Pelanggaran HAM masa Lalu menjadi Tanggung Jawab SBY dan Kabinetnya

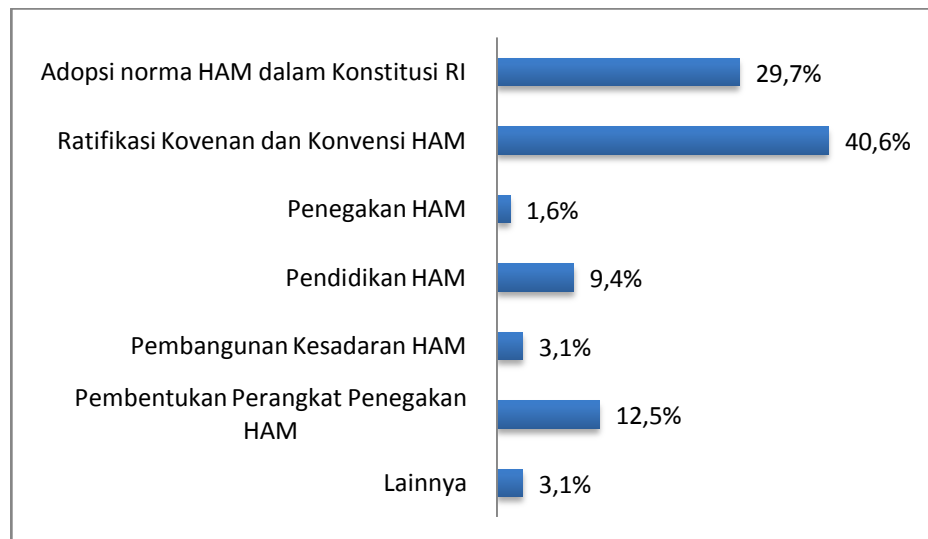


Kekecewaan publik memang sangat kuat karena ekspektasi yang besar dan seharusnya dilakukan oleh SBY dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sama sekali tidak mengalami kemajuan. Bagi publik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dalam 2 tahun ini menggagas langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, hanya berhenti di wacana. Padahal, publik menghendaki adanya pengungkapan kebenaran, melalui KKR, dan untuk kasus-

kasus tertentu bahkan didorong untuk dilakukan investigasi ulang. Bagi para responden, proses hukum masih menjadi pilihan penyelesaian pelanggaran HAM.

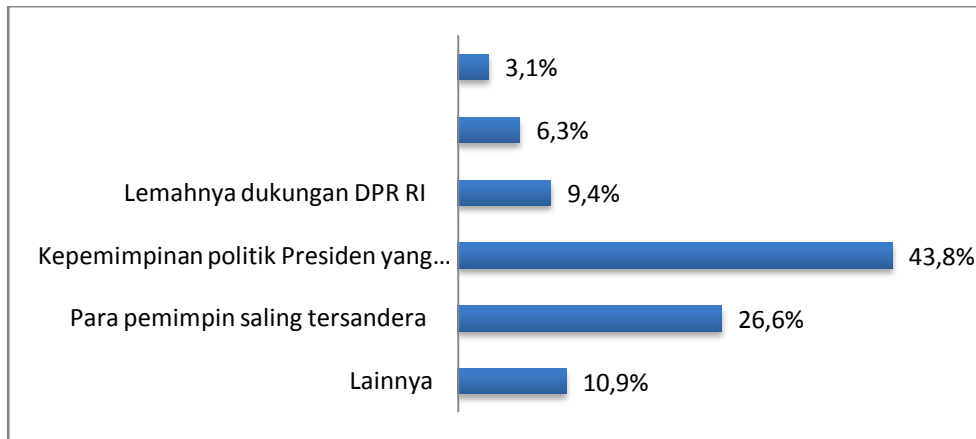
Meskipun publik kecewa dengan kepemimpinan SBY, tetapi sejak reformasi bergulir 1998, setidaknya kemajuan dibidang HAM bisa dicatat. Sebanyak (40,6%) responden mencatat prestasi yang dicapai oleh elemen negara adalah ratifikasi kovenan dan konvensi HAM. Selanjutnya, sebanyak (29,7%) responden mencatat capaian dalam hal adopsi norma HAM dalam Konstitusi RI. Sisanya (12,5%) responden mencatat pembentukan perangkat penegakan HAM sebagai prestasi. **Lihat Grafik 8:**

Grafik 8:
Prestasi HAM Pasca Reformasi



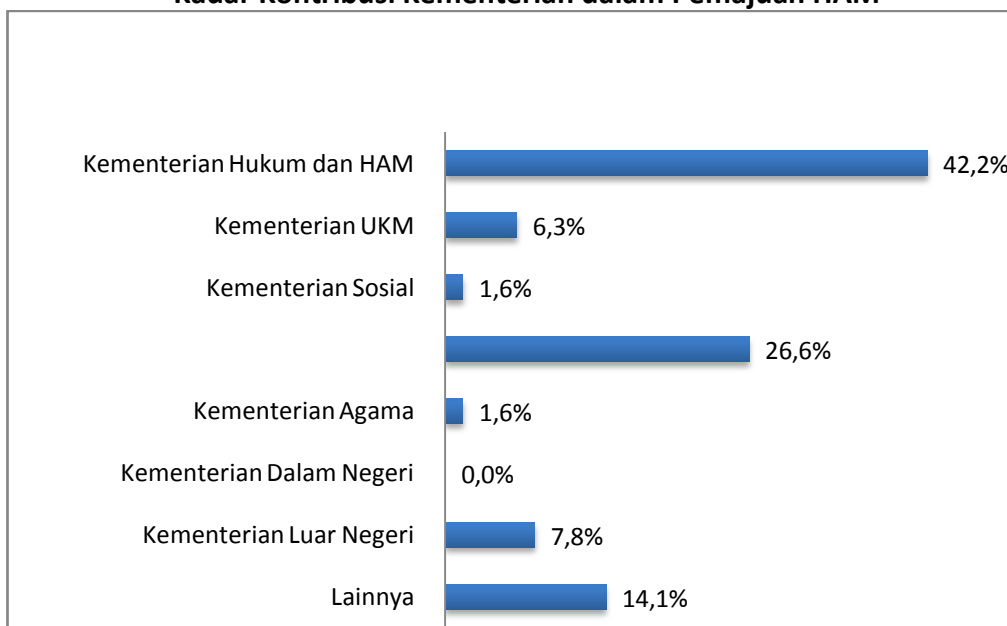
Mengapa penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masih berjalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran, menurut responden, yang utama lebih disebabkan karena kepemimpinan politik Presiden SBY yang tidak berani mengambil risiko demi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pendapat ini diafirmasi oleh (43,8%) responden survei ini. Bahkan sebanyak (26,6%) responden, meyakini bahwa saling sandera antar pemimpin politik di negeri ini menjadi salah satu penyebab gagalnya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. **Lihat Grafik 9:**

Grafik 9:
Penyebab Kegagalan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu



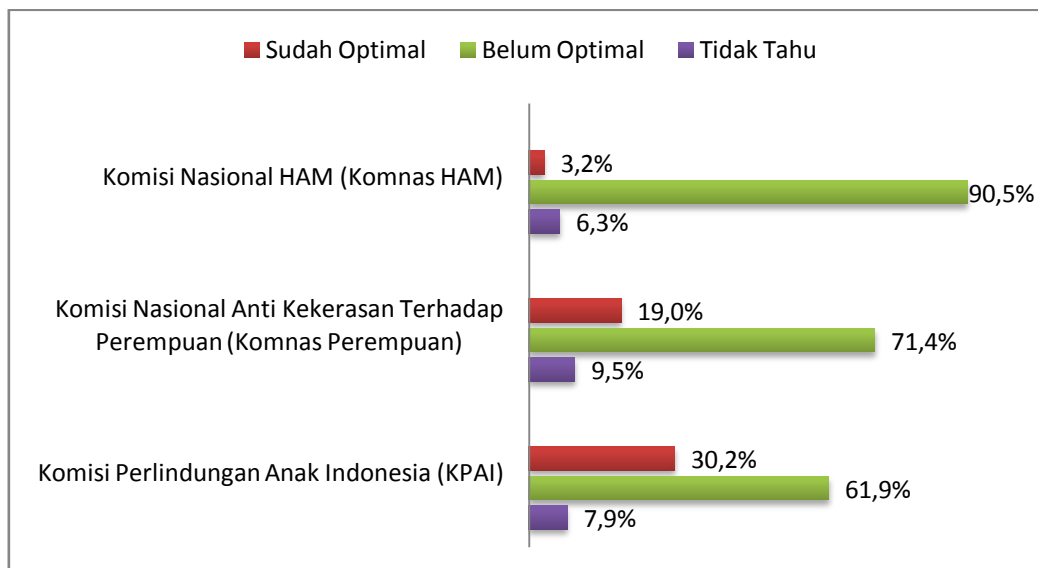
Buruknya prestasi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM disebabkan juga oleh kinerja kementerian terkait yang lemah di bidang HAM. Di mata publik, kadar kontribusi kementerian dalam bidang HAM yang paling besar melekat pada Kementerian Hukum dan HAM (42,2%), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (26,6%), Kementerian Luar Negeri (7,8%). Sementara kementerian yang paling rendah memiliki kontribusi pada pemajuan HAM adalah Kementerian Agama (1,6%), dan Kementerian Sosial (1,6%). **Lihat Grafik 10:**

Grafik 10:
Kadar Kontribusi Kementerian dalam Pemajuan HAM



Secara paralel, buruknya situasi HAM di Indonesia juga disebabkan karena belum optimalnya kinerja kelembagaan HAM utama, yang sering disebut dengan Tiga (3) Nasional Human Rights Institution (NHRI) yang memiliki mandat khusus dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Di mata responden, KomnasHAM dipersepsi oleh 90,5% responden sebagai belum optimal menjalankan mandat kelembagaannya. Sementara Komnas Perempuan dianggap belum optimal oleh (71,4%) responden. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dipersepsi belum optimal oleh (61,9%) responden. Jika dibandingkan, maka kinerja ketiga lembaga HAM di atas yang paling buruk adalah Komnas HAM, disusul Komnas Perempuan, dan kemudian KPAI. **Lihat Grafik 11:**

Grafik 11:
Kinerja Tiga Lembaga HAM

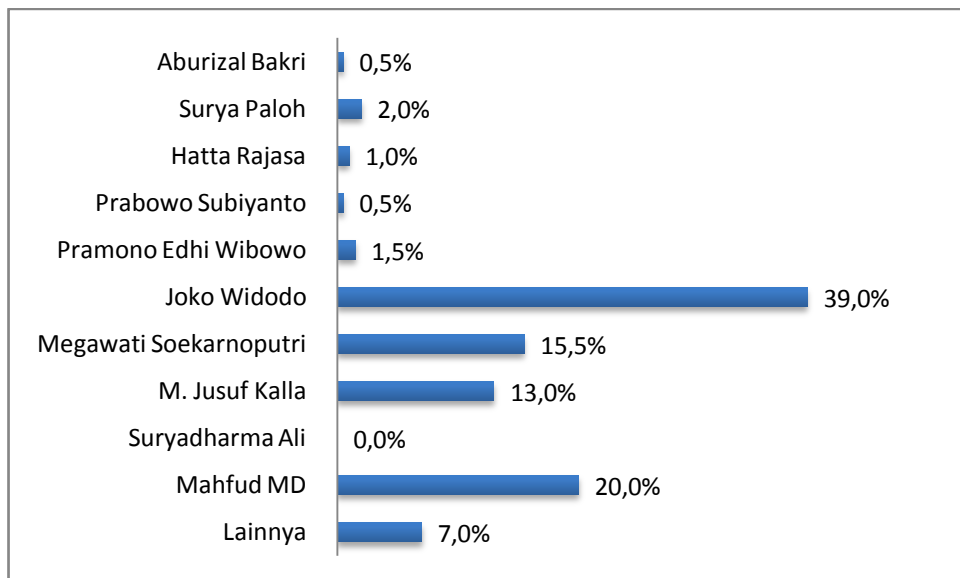


Kondisi HAM selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya akan berlanjut meski pada 2014 kepemimpinan nasional akan berganti. Potensi stagnasi ini disebabkan para calon presiden dan/atau wakil presiden diragukan pula komitmennya terhadap pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Persepsi publik terkait capres/cawapres yang memiliki komitmen tinggi terhadap HAM penting menjadi rujukan bagi para pemilih Pemilu 2014. Terdapat empat (4) tokoh nasional yang diindikasi/ didorong untuk menjadi capres dan cawapres, yang memiliki komitmen cukup terhadap HAM. Joko Widodo dipersepsi oleh (39,0%) responden sebagai capres/cawapres paling berkomitmen pada HAM. Disusul oleh Mahfudh MD yang dipersepsi oleh (20%) responden. Berikutnya adalah Megawati Soekarnoputri (15,5%), dan M. Jusuf Kalla (13%). Jika mengikuti irama survei ini, maka kombinasi capres dan

cawapres yang paling peduli HAM adalah Joko Widodo-Mahfud MD. **Lihat Grafik 12:**

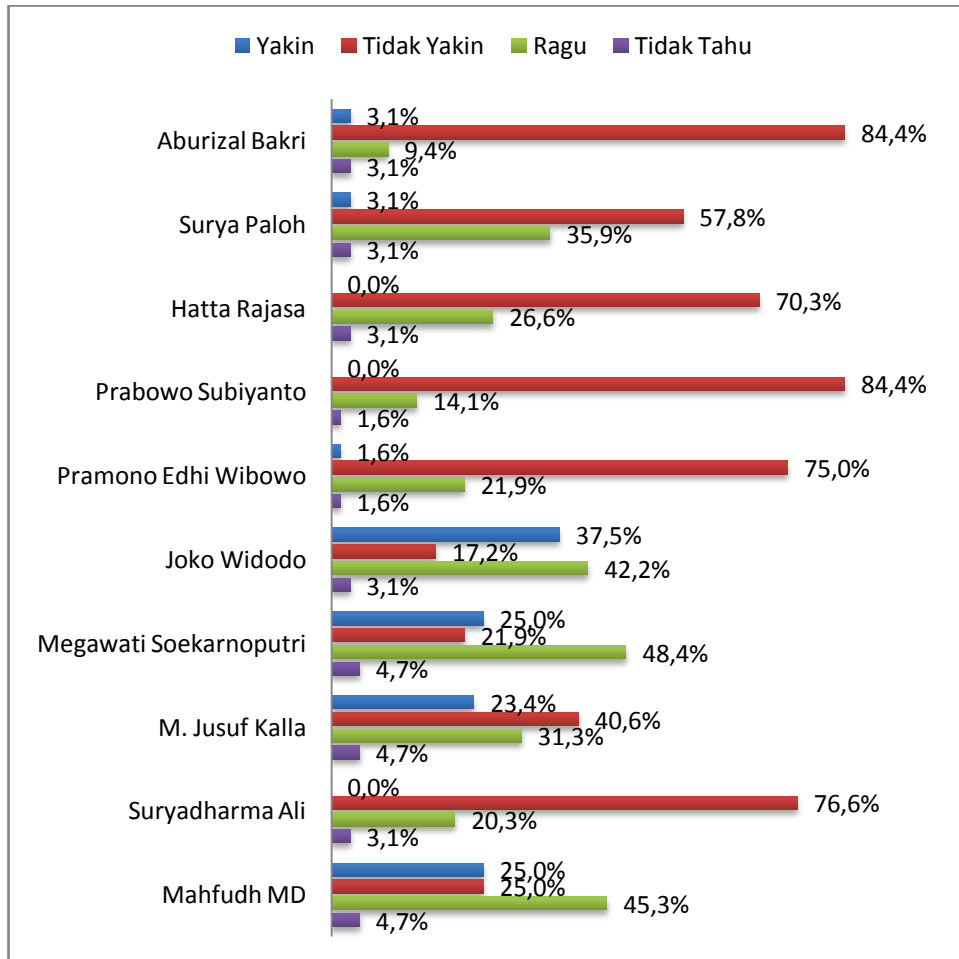
Sementara, capres/cawapres dengan komitmen paling rendah ditempati oleh Suryadharma Ali (0,0%) Prabowo Subiyanto (0,5%) dan Aburizal Bakri (0,5%) responden. Ketiga tokoh ini dipersepsi sangat buruk komitmennya terhadap HAM. Khusus Suryadharma Ali disebabkan oleh jejak rekam yang selama ini peragakannya. Prabowo Subiyanto disebabkan karena dugaan keterlibatannya dalam berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Sedangkan Aburizal Bakri dimungkinkan karena perangai bisnis yang dilakoninya yang berdampak pada pelanggaran HAM.

Grafik 12:
Komitmen Tokoh Nasional pada Pemajuan HAM



Pararel dengan persepsi pada tingkat komitmennya pada pemajuan HAM, responden juga yakin jika Joko Widodo-Mahfudh MD., mampu menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, jika kelak memimpin negeri ini. Jokowi dipersepsi oleh (37,5%) responden mampu menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Sedangkan Mahfud diangka (25%). Sisanya yang terbesar justru ketidak yakinannya. Terhadap Prabowo Subiyanto dan Aburizal Bakri, ketidakyakinan akan mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat sangat besar di angka (84,4%) . Mengikuti irama survei ini, maka Prabowo Subiyanto dan Aburizal Bakri adalah tokoh/kandidat yang akan memutus harapan publik pada pemajuan HAM pasca Pemilu 2014. **Lihat Grafik 13:**

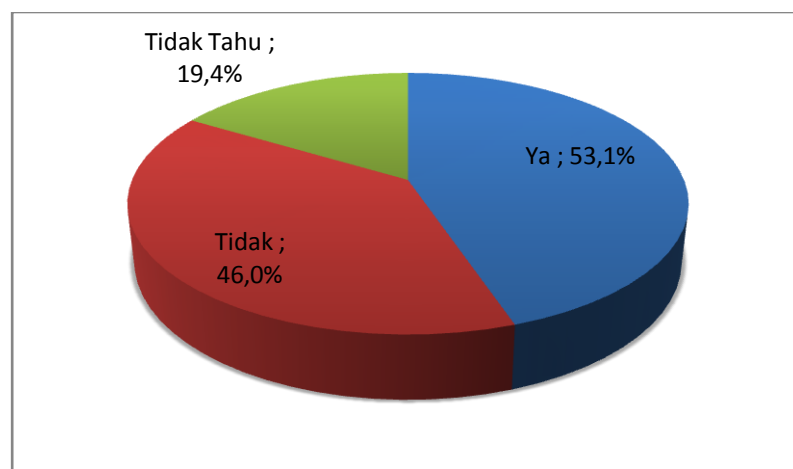
Grafik 13
Keyakinan Responden terhadap Kemampuan Tokoh Nasional Menuntaskan Pelanggaran HAM jika menjadi Pemimpin Nasional



Khusus terhadap Prabowo Subiyanto, yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus penghilangan orang secara paksa diyakini oleh (53,1%) responden akan menjadi pertimbangan para pemilih pada Pemilu 2014. Sementara (46%) responden justru tidak yakin bahwa pemilih akan mempertimbangkan aspek dugaan keterlibatan Prabowo Subiyanto dalam pelanggaran HAM berat. Pemecatan Prabowo Subiyanto dari kesatuan militer, oleh Dewan Kehormatan Militer (DKM) sekecil apapun mengindikasikan bahwa Prabowo menghadapi masalah pada waktu itu. Perlu dicatat, bahwa temuan ini mengkonfirmasi keyakinan responden terhadap pemilih. Bukan keyakinan responden terhadap Prabowo Subiyanto. Jadi, jika selama ini Prabowo Subiyanto dipersepsi cukup memiliki elektabilitas tinggi, itu adalah realitas

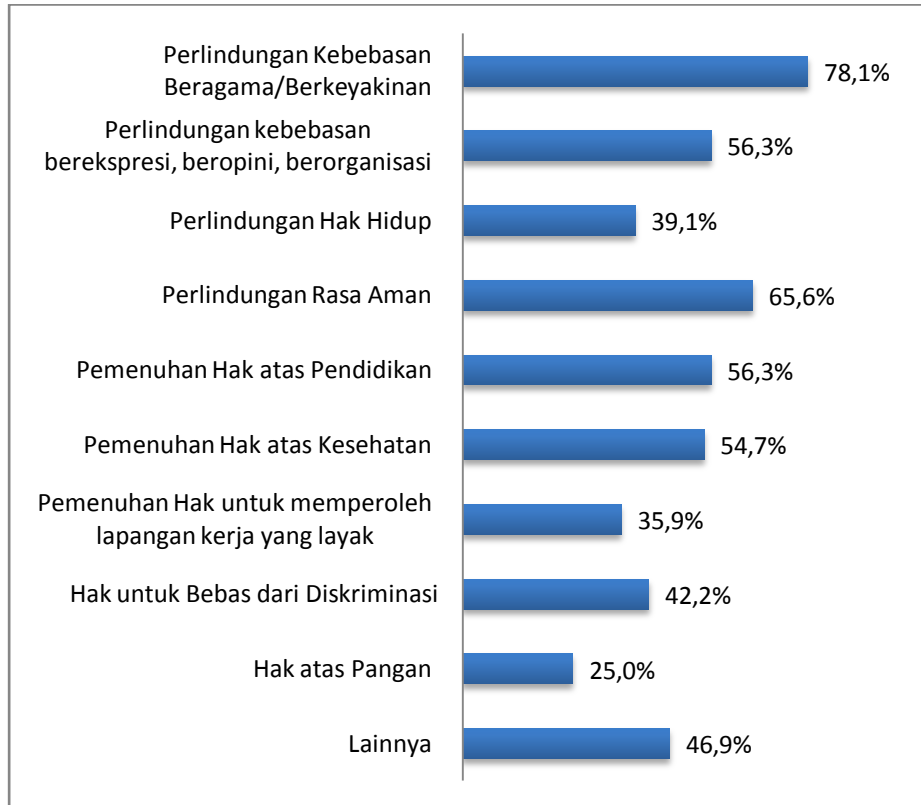
politik. Sementara dari survei ini, idealitas politik menunjukkan bahwa diyakini para pemilih akan mempertimbangkan jejak rekam Prabowo Subiyanto. **Lihat Grafik 14:**

Grafik 14:
Pemilih pada Pemilu 2014 akan mempertimbangkan Dugaan Keterlibatan Prabowo Subiyanto dalam Kasus Pelanggaran HAM

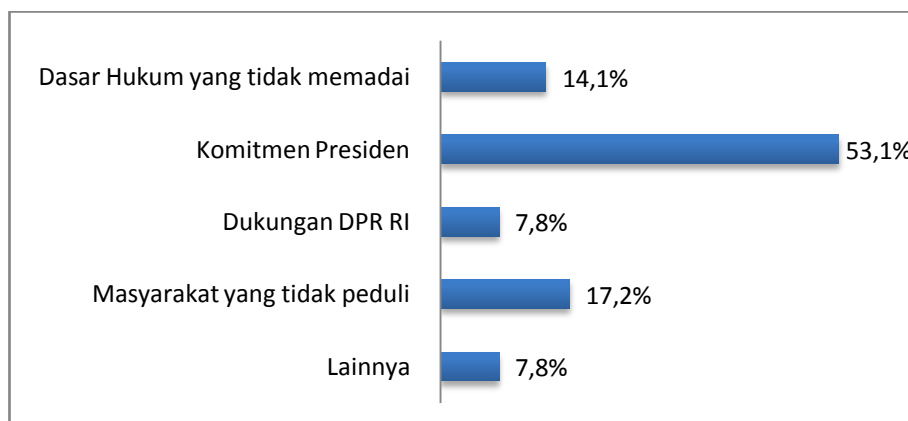


Siapapun yang memimpin negeri ini pada 2014 mendatang, penting diingatkan 5 agenda prioritas pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Survei ini mengidentifikasi 5 prioritas utama kinerja HAM pada periode kepemimpinan 2019-2019, yaitu: perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan (78,1%), perlindungan rasa aman (65,6%), perlindungan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berserikat (56,3%), pemenuhan hak atas pendidikan (56,3%), dan pemenuhan hak atas kesehatan (54,7%). **Lihat Grafik 15:**

Grafik 15:
Prioritas Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM 2014-2019



Grafik 16:
Tantangan Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM



Sementara, tantangan paling serius dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terletak pada komitmen presiden (53,1%), kurang pedulinya masyarakat terhadap HAM (17,2%), dan Kerangka Hukum yang

belum memadai (14,1%). Artinya, masa depan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang utama terletak pada komitmen presiden, sebagai pemegang tampuk kepemimpinan nasional. Di sini, mendorong pemilih untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang memiliki komitmen dan diyakini mampu memajukan, melindungi, dan memenuhi HAM, menjadi sangat relevan. Untuk memajukan hak asasi manusia dan idealitas politik di masa yang akan datang, gerakan meyakinkan para pemilih 2014 agar menjadi pemilih yang **JITU²:Jeli, inisiatif** (menggali rekam jejak dan meyakinkan pemilih lain, **toleran** dan (ter)ukur. **Lihat Grafik 16:**

KESIMPULAN

1. Dengan menggunakan 8 indikator utama, indeks kinerja HAM Republik Indonesia pada 2013 mengalami penurunan skor dari tahun sebelumnya. Rata-rata skor indeks kinerja penegakan HAM tahun 2013 adalah 2,25 menurun dari tahun sebelumnya, yang rata-rata berada pada skor 2,82 (2012), skor 2,30 (2011), dan skor 2,53 (2010). Tren menurun pada tahun 2013 menggambarkan akumulasi kekecewaan publik pada negara, khususnya pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang hingga di masa akhir tahun jabatannya, tidak menunjukkan kesungguhan dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
2. Kepemimpinan SBY-Budiono, gagal memanfaatkan momentum stabilitas politik dan ekonomi pada 10 tahun terakhir untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. SBY memiliki komitmen rendah (52,4%) pada pemajuan HAM. Bahkan 38,2% responden mengatakan SBY tidak memiliki komitmen. Akibatnya selama 10 tahun terakhir pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM mengalami stagnasi alias jalan di tempat (56%).
3. Meskipun publik kecewa dengan kepemimpinan SBY, tetapi sejak reformasi bergulir 1998, setidaknya kemajuan dibidang HAM bisa dicatat sebagai hasil kerja kolektif elemen negara, yaitu (40,6%) responden mencatat ratifikasi kovenan dan konvensi HAM, (29,7%) responden mencatat capaian dalam hal adopsi norma HAM dalam Konstitusi RI. Sisanya (12,5%) responden mencatat pembentukan perangkat penegakan HAM sebagai prestasi.
4. Kepemimpinan politik Presiden SBY yang tidak berani mengambil risiko demi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diafirmasi oleh

²Istilah JITU diadopsi dari kampanye yang digagas oleh Komnas Perempuan bersama elemen masyarakat sipil pada 2009.

(43,8%) responden survei ini. Bahkan sebanyak (26,6%) responden, meyakini bahwa saling sandera antar pemimpin politik di negeri ini menjadi salah satu penyebab gagalnya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

5. Secara paralel, buruknya situasi HAM di Indonesia juga disebabkan karena belum optimalnya kinerja kelembagaan HAM utama, yang sering disebut dengan Tiga (3) Nasional Human Rights Institution (NHRI) yang memiliki mandat khusus dalam pemajuan dan perlindungan HAM.
6. Terdapat empat (4) tokoh nasional yang memiliki komitmen cukup terhadap HAM. Joko Widodo dipersepsi oleh (39,0%) responden sebagai capres/cawapres paling berkomitmen pada HAM dan diyakini (37,5%) bisa menegakan HAM. Disusul oleh Mahfudh MD yang dipersepsi oleh (20%) sebagai berkomitmen dan diyakini mampu (25%) menegakan HAM. Jika mengikuti irama survei ini, maka kombinasi capres dan cawapres yang paling peduli HAM adalah Joko Widodo-Mahfud MD. Sedangkan capres/cawapres dengan komitmen paling rendah ditempati oleh Suryadharma Ali (0,0%) Prabowo Subiyanto (0,5%) dan Aburizal Bakri (0,5%) responden.
7. Dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM berat, diyakini oleh (53,1%) responden akan menjadi pertimbangan para pemilih pada Pemilu 2014. Sementara (46%) responden justru tidak yakin bahwa pemilih akan mempertimbangkan aspek dugaan keterlibatan Prabowo Subiyanto dalam pelanggaran HAM berat.
8. Terdapat 5 agenda prioritas pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Survei ini mengidentifikasi 5 prioritas utama kinerja HAM pada periode kepemimpinan 2019-2019, yaitu: perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan (78,1%), perlindungan rasa aman (65,6%), perlindungan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berserikat (56,3%), pemenuhan hak atas pendidikan (56,3%), dan pemenuhan hak atas kesehatan (54,7%).
9. Tantangan paling serius dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terletak pada komitmen presiden (53,1%). Di sini, mendorong pemilih untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang memiliki komitmen dan diyakini mampu memajukan, melindungi, dan memenuhi HAM, menjadi sangat urgen dan relevan.

SETARA Institute merekomendasikan:

1. Kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, secara sukarela, melakukan audit kinerja kepresidenan dan kementerian terkait rencana pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang dijanjikan sejak

pertama kali memimpin Indonesia pada 2004. Untuk hal yang sama, DPR RI, melalui Komisi III, melakukan audit kinerja HAM secara komprehensif selama masa kepemimpinan SBY.

2. Untuk Pemilu 2014 yang berkualitas, kepada partai politik, KPU, Bawaslu, mengintegrasikan isu HAM dalam materi kampanye menjelang Pemilu 2014. Isu HAM harus diberi ruang untuk diperdebatkan dan menjadi referensi bagi calon pemilih Pemilu 2014. Pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu juga harus memastikan tidak digunakannya isu SARA dan penyebaran kebencian sebagai cara memikat dukungan publik.
3. Institusi-institusi HAM nasional melakukan peningkatan kinerja pemajuan, perlindungan HAM sesuai dengan mandat kelembagaannya. Penguatan kelembagaan HAM juga harus menjadi agenda pasca Pemilu 2014 di tangan kepemimpinan nasional baru.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas RI, mengintegrasikan isu hak asasi manusia sebagai standar perencanaan pembangunan.
5. Kepada elemen masyarakat sipil, untuk mewujudkan idealitas politik melahirkan kepemimpinan nasional yang peduli dan berkomitmen tinggi pada pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih agar memilih secara jitu pilihan-pilihannya, sehingga bisa menghasilkan kepemimpinan nasional yang berintegritas tinggi.